

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Nagori Karang Bangun
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

FATIMAH HAFNI SINAGA

188520069



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)12/11/24

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Nagori Karang Bangun
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara)

Nama Mahasiswa : Fatimah Hafni Sinaga

NPM : 188520069

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Pembimbing II

Marlina Deliana, S.AB, M.AB

Mengetahui

Dekan

Dr. Wahid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Kepala Prodi Administrasi Publik

Ina Ina Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 13 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang telah saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2024



Fatimah Hafni Sinaga

188520069

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Hafni Sinaga

NPM : 188520069

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas RoyaltiNoneklusif (Non-exclusifRoyalty-FreeRight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2024



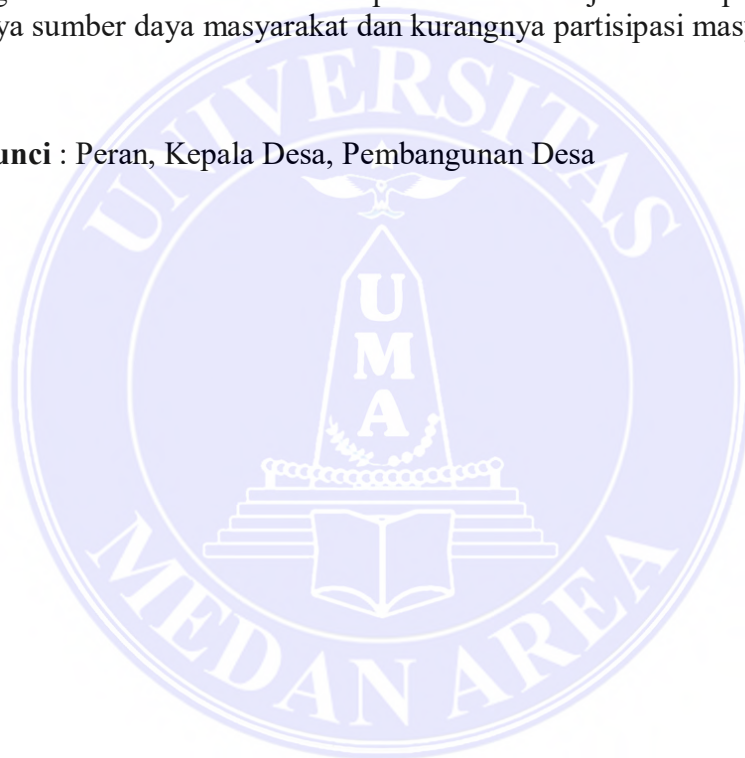
Fatimah Hafni Sinaga

188520069

ABSTRAK

Terciptanya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran kepala desa. Dengan demikian perannya menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi guna memperlancar pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan indikator peran dari Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu motivator, fasilitator, mobilisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala desa sudah cukup baik meskipun belum berjalan dengan optimal dalam menjalankan perannya untuk memotivasi masyarakat dan memfasilitasi kegiatan pembangunan desa. Hambatan kepala desa menjalankan perannya adalah rendahnya sumber daya masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat.

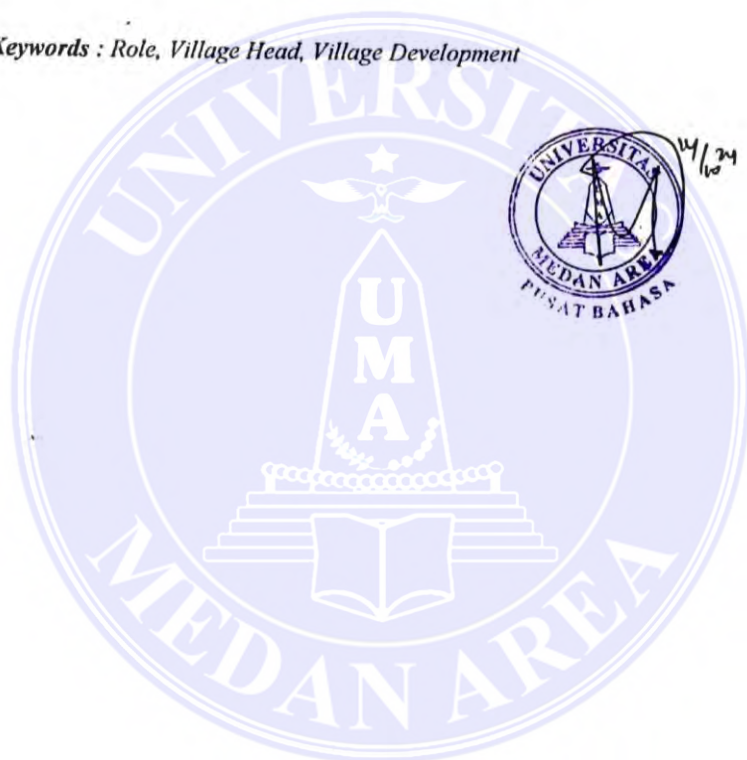
Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan Desa



ABSTRACT

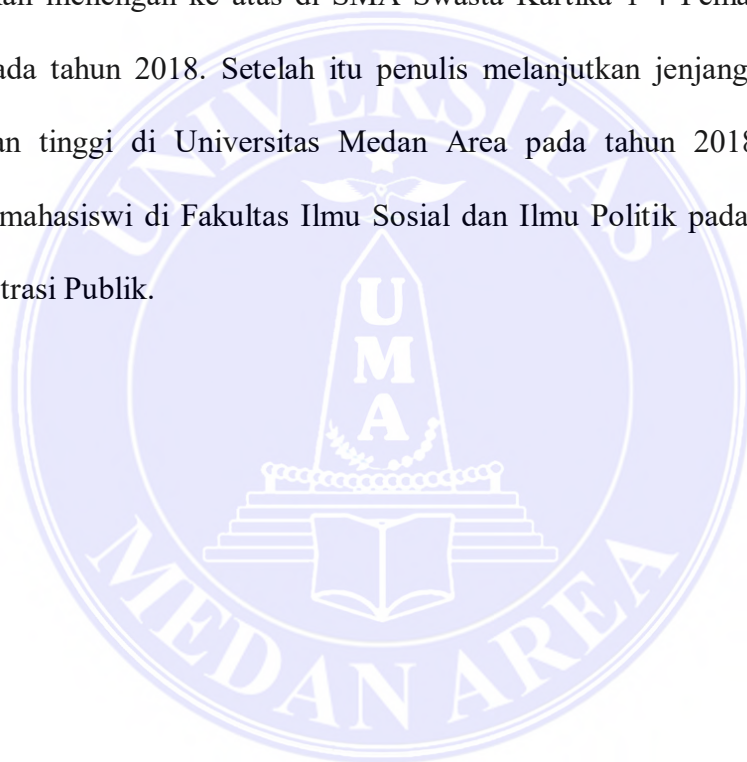
The creation of advanced and prosperous village development cannot be separated from the role of the village head. Therefore, their role is very important in the implementation of development and in increasing public awareness to participate in facilitating development. This research aimed to identify the role of the village head in the implementation of development and its inhibiting factors. This type of research used a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research used indicators of roles from Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42), namely motivator, facilitator, mobilizer. The result of this research showed that the village head had performed quite well, although not yet optimally, in carrying out his role to motivate the community and facilitate village development activities. The obstacle for the village head in carrying out his role was the low quality of human resources and the lack of community participation.

Keywords : *Role, Village Head, Village Development*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fatimah Hafni Sinaga, lahir di P.Siantar pada tanggal 10 November 2000 merupakan anak keempat dari ayahanda Yatiman Sinaga dan Ibunda Misri Andraeni. Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 091277 Siantar Estate. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan menengah ke atas di SMA Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar dan tamat pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Medan Area pada tahun 2018 dan terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Administrasi Publik.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara)”. Adapun maksud dan tujuan diajukannya skripsi ini sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapat dukungan, bantuan, arahan serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Yatiman Sinaga dan Ibu Misri Adraeni yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan moril dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Se selaku Rektot Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi masukan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi masukan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP selaku Dosen Sekretaris skripsi telah banyak membantu penulis serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Semua informan yang telah membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat terbaikku Siti, Alfina, Anang, Imam terimakasih atas dukungan, semangat, mendengarkan keluh-kesah saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sepupu-sepupu tersayang yang menjadi sahabat terbaik saya sejak kecil Zura, Febi, Zira, Zua terima kasih atas semangat, keceriaan yang selalu di berikan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Administrasi Publik stambuk 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu peratu.
13. Kepada diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karna

terus berusaha dan berjuang untuk tidak menyerah, serta menikmati setiap proses yang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang membangun. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pendidikan dan masyarakat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2024

Fatimah Hafni Sinaga

188520029

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Peran.....	8
2.2 Desa.....	9
2.3 Kepala Desa.....	13
2.3.1 Pengertian Kepala Desa.....	13
2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	15
2.4 Pembangunan.....	17
2.5 Pembangunan Desa.....	19
2.5.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	19
2.5.2 Azas-Azas Pembangunan Desa.....	21
2.6 Penelitian Relevan.....	22
2.7 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29

3.3 Waktu Penelitian	29
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Metode Analisi Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil	35
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.2. Visi dan Misi Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.....	36
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Karang Bangun	37
4.2 Pembahasan Penelitian.....	44
4.2.1 Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.....	44
4.2.2 Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.....	58
BAB V PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	26
Gambar 2. Struktur Organisasi	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Penelitian	29
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	65
Lampiran 2. Dokumentasi penelitian.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “ Bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Sementara daerah pedesaan didefinisikan sebagai daerah di mana pertanian adalah kegiatan utama, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pengaturan fungsional daerah sebagai tempat pemukiman pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Di lingkungan Kabupaten Simalungun, masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain yaitu nagori, dan dengan nama lain kepala desa yaitu pangulu. Masyarakat Kabupaten Simalungun menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak asal usul, tradisional dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Simalungun dan dihormati masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Desa adalah Desa atau yang disebut dengan Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat 8 Pemerintahan Nagori adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada ayat 9 menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut Pangulu adalah pejabat Pemerintahan Nagori yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah. Ayat 10 menyatakan bahwa Perangkat Desa atau yang disebut dengan Tingkat Nagori adalah unsur staf yang membantu pangulu dalam menyusun kebijakan dan berkoordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagori, unsur pendukung tugas Pangulu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat 1 mengatakan “ Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Dan dalam pasal 78 dikatakan bahwa “pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan dalam Pasal 1(9) bahwa “pembangunan

desa adalah adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dna bagi pengembangan pribadi masyarakat.”

Pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah keseluruhan upaya dari rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan budaya. Di dalam proses pembangunan desa itu sendiri terdapat dua unsure yaitu keterlibatan masyarakat atau swadaya dan pembinaan pemerintah. Optimalisasi pembangunan sangat tergantung pada bagaimana fungsi pemerintah sebagai koordinator pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan tugas dan peran kepala desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran kepala desa merupakan hal yang sangat penting, karna posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakat sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

Nagori Karang Bangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara. Nagori Karang Bangun yang dominan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Desa karang telah banyak mengalami perubahan di berbagai sektor seperti: teknologi, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, perubahan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dalam pembangunans serta peran masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan yang perlu di dukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

Kepala desa sebagai Pemerintahan Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan di wujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, lampu penerangan, pos jaga serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Namun, di Desa Karang Bangun masi ada pembangunan yang belum terlaksana dan belum optimal seperti kurangnya pos keamanan/pos kamling, kurangnya penerangan jalan.

Terciptanya pembangunan desa yang sejahtera tentunya tidak terlepas dari peran kepala desa dan juga peran masyarakat desa. Namun di Karang Bangun masih ditemukan masyarakat yang kurang rasa kesadarannya untuk turut serta berperan dan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat pembangunan yang ada seperti pembangunan parit atau selokan yang kondisinya kurang terawat karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di parit atau selokan sehingga parit atau selokan dipenuhi dengan sampah dan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu masih terdapat pembangunan yang belum merata seperti pos keamanan, jalan dusun dan pondasi parit. Kurangnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, hal tersebut terlihat dari kurang optimalnya kepala desa serta perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan di nagori Karang Bangun, seperti kurangnya peran aparat desa dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat desa. Kepala desa harus mampu membina dan menggerakkan masyarakat dengan musyawarah desa dan musrembang agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan, karna tanpa adanya partisipasi dan kehadiran masyarakat pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. Selain upaya aparat desa tentu perlu adanya kesadaran diri dari masing-masing warga untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyadari bagaimana pentingnya peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengetahui permasalahan secara jelas untuk itu di butuhkan penelitian yang akurat. Hal ini memotivasi penulis untuk melakukan penelian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu;

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Nagori Karang Bangun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

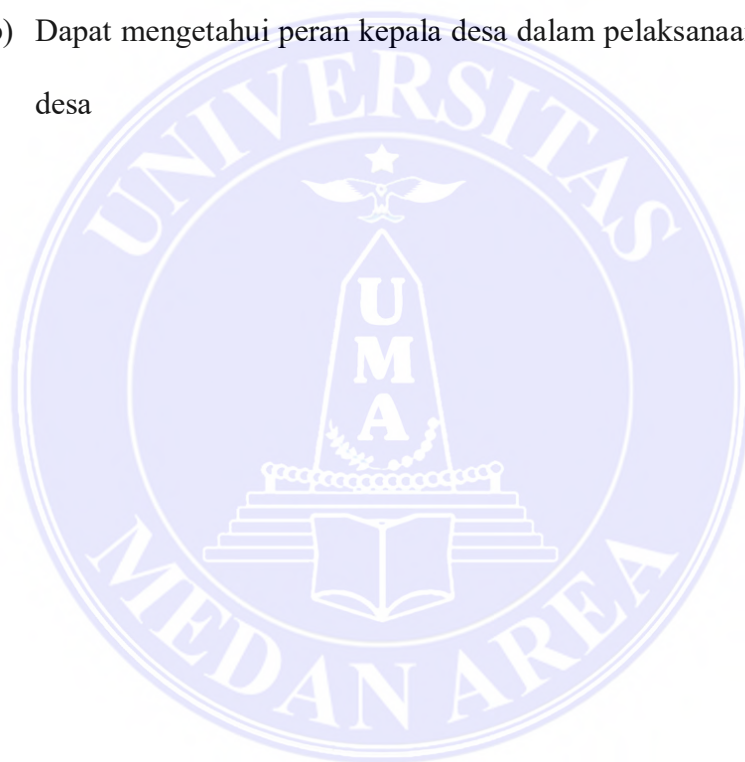
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan referensi yang berhubungan dengan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan dorongan kepala desa untuk lebih baik dan lebih amanah dalam peran, tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam pembanguna desa,

3) Bagi Peneliti

- a) Penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan program Strata 1(S1)
- b) Dapat mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat perubahan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang tersebut dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Peran juga dapat diartikan seperangkat harapan yang dibebankan pada individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang peran sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Hakekatnya peran juga bisa dirumuskan menjadi suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan suatu jabatan tertentu.

Menurut Veithzal Rivai (2006:148) “peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.” Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran, dan setiap pekerjaan pemimpin harus menciptakan harapan tentang perilaku mereka yang bertanggung jawab. Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengemukakan tiga indikator peran sebagai berikut: Pertama, Motivator, motivator adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan oleh individu sehingga orang yang diberi

motivasi tersebut mau menuruti atau melakukan hal yang dimotivasi secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Kedua, Fasilitator, fasilitator adalah Seseorang yang membantu dalam proses memfasilitasi pembangunan dan komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama. Ketiga, Mobilisator, mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna buat kepentingan bersama. Teori Bintoro Tjokroamidjojo melihat peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang di dasarkan pada harapan terhadap peran yang dimaksud.

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peran mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Desa

Desa secara Etimologikata berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis , Desa

atau *village* diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa merupakan satu wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga yang memiliki sistem sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Desa berhak mengatur, mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kebhinekaan, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan dalam proses peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaagaman, partisipasi, otonomi asli, dekomratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Widjaja (2002:90) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang berhal menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan menurut R. Bintarto dalam buku akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) menyebutkan bahwa desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, serta *cultural* setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Pengertian desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan asta istiadat. Sejalan dengan kewenangan desa pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kewenangan Dsea meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa,
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Peran kepala desa dalam pembangunan desa adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan dan penggerak pembangunan. Peran kepala desa sangat penting dalam menumbuh dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan yang terencana. Sesuai dengan kedudukan kepala desa dalam pemerintahan desa, maka tanggung jawabnya adalah menyelenggarakan kegiatan dalam lingkup pekerjaan rumah tangganya sendiri, menyelenggarakan urusan pembangunan baik dari pemerintah maupun pemerintah desa dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat yang menjadi titik utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Menurut Saparin dalam Hanif Nurcholis (2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia meruoakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Kepala desa merupakan orang yang paling berperan dalam masyarakat yang merupakan wakil terpilih dari dipilih langsung oleh warganya. Kepala desa berhak mengajukan pencalonan pengangkatan atau pemberhentian kader desa kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 pasal 203 yang berbunyi:

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1), di tetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kepala desa adalah pemimin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala desa juga berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan tingkat desa secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, serta membina masyarakat dan organisasi yang ada, memelihara sumber daya desa, dan melaksanakan keputusan di tingkat desa berdasarkan peraturan Pemerintah, menyusun rencana kerja tahunan dan rencana lima tahunan sebagai

dasar untuk melaksanakan tugas dan rencana pendapatan/belanja desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberi pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat dan pernyataan kepada lembaga musyawarah desa.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mendukung dan memberdayakan masyarakat desa. Selain tugas, kepala desa memiliki wewenang terkait dengan desa berdasarkan Pasal 26(2) UU No. 6 Tahun 2014, wewenang kepala desa sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,
- d) menetapkan Peraturan Desa,
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- f) membina kehidupan masyarakat Desa,
- g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa,
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,

- l) memanfaatkan teknologi tepat guna,
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,
- n) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas serta wewenang, Kepala Desa memiliki kewajiban sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 27, tentang desa, sebagai berikut:

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya kepala desa mempunyai peran yang sangat menentukan dalam menggerakkan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan kepala desa dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

2.4 Pembangunan

Secara umum pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif-alternatif yang lebih sah bagi setiap warga negara untuk mewujudkan dan memenuhi aspirasinya yang paling manusiawi. Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian pembangunan. Suharyanto (2006:65) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Siagian (2008:21) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation builnsing*).

Sedangkan Effendi (2002:9) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan baik lahiriah maupun batiniah.

Tjokroadmijojo dan Mustapadidjaya (1995:22) menyatakan proses pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi, artinya suatu bangsa mencapai tingkat kematangan tertentu

dalam bidang politik dan sosial. Adapun tujuan pembangunan menurut Zamhariri dalam Effendi (2002:17) sebagai berikut:

1. terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Dwijowijoto (2003:296) menginventarisasikan faktor-faktor kunci bagi pembangunan yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pembangunan, yaitu:

a. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi faktor pertama keberhasilan pembangunan karena kepemimpinan meletakkan visi dan misi dari pembangunan. Pada setiap organisasi, pemimpin mempunyai tugas mengkreasikan nilai pada organisasi.

b. Faktor Manajemen

Manajemen membuat organisasi berfungsi secara optimal. Dari konsep besarnya, manajemen merupakan urutan pekerjaan yang metodologis, sekuensial, dan dapat di benarkans ecara keilmuan. Langkah utama untuk membangun sistem pendidikan yang sebangun dengan kebudayaan manajemen itu sejak dini.

c. Faktor Kelembagaan

Setiap negara dan masyarakat modern dipastikan memiliki tiga jenis organisasi dimana setiap warga terikat atau menjadibagian dari organisasi tersebut. Organisasi tersebut adalah organisasi publik, bisnis dan nirlaba.

d. Faktor Sistem Nilai

Semua nilai merupakan pondasi internal bagi sukses tidaknya pembangunan. Sistem nilai pertama adalah profesional. Profesional adalah sebuah sikap yang bertumpuh pada tiga hal yaitu: pemilikan, pengetahuan, kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi keterampilan dan memiliki integritas modal.

e. Faktor Kekayaan Alam Suatu Bangsa

Suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah adalah sebuah modal yang luar biasa. Kekayaan alam bukan saja menjadi capital ekonomi, namun juga capital politi.

2.5 Pembangunan Desa

2.5.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pada hakikatnya pembangunan desa mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kerjasama untuk mengarusutamakan perdamaian dan keadilan sosial. Menurut R.Bintoro (2003:25) pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan terendah, yaitu desa dan kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 mengatakan bahwa:

- a) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Taliziduhu (1987:54) pembangunan desa sebagai suatu proses dengan upaya masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat dan kemungkinan mereka diberi sumbangan penuh kepada kemajuan nasional. Tujuan utama dalam pembangunan desa adalah menjadikan desa di seluruh Indonesia dengan tingkat pembangunan desa dan klasifikasi desa mandiri, yaitu desa maju dan berkembang yang taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya terus meningkat.

Harun & Arianto (2011:94) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan program yang ditunjukkan untuk pengadaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa pembangunan

pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat tertentu atau dalam hal ini adalah warga desa yang miskin

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pedesaan adalah suatu proses transformasi yang bertujuan untuk masyarakat pedesaan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat pedesaan. Dan juga proses perubahan seluruh aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya masyarakat desa kearah yang lebih baik.

2.5.2 Azas-Azas Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat pedesaan menganut tiga azas, yaitu azas pembangunan integral, kekuatan sendiri, pemufakatan bersama (Tjokrowinoto, 2007:36). Adapun ketiga azas, sebagai berikut:

- 1) Azas pembangunan integral yaitu pembangunan yang seimbang dari semua aspek masyarakat (pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan dll) sehingga menjamin suatau perkembangan yang serasi dan adil.
- 2) Azas kekuatan sendiri yaitu bahwa setiap usaha harus di dasarkan pada kekuatan dan kemampuan desa itu sendiri, dengan tidak menunggu pemberian dari pemerintah.
- 3) Azas pemufakatan bersama mengandung arti bahwa pembangunan harus di laksanakan dengan benar, untuk melaksanakan proyek

bukan atas prioritas atasan melainkan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

2.6 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan salah satu sumber referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori yang digunakan saat mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk mendukung permasalahan yang sedang dibahas, peneliti berusaha menelusuri kembali berbagai literatur dan penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan permasalahan penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yaitu:

- 1) Fremias Wenda, Buharnuddin Kiyai, Deyssi L.Tamponanoy, dengan penelitian berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa Di Desa Kumulume. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dengan 10 informan yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, ketua dan anggota BPD dan tokoh masyarakat/adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawacara, studi dokumentasi, observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peranan kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Kumulume berjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil

yang belum maksimal. Bahwa masih terdapat beberapa program/rencana pembangunan desa yang belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat kecukupan anggaran pembangunan yang masih rendah, serta hambatan birokrasi, rentang kendali dan kondisi geografis wilayah desa yang sulit terjangkau sehingga ADD dan dana otsus sering mengalami keterlambatan pencairannya. Yang menjadi pembeda terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada peran kepala desa dalam memotivasi, fasilitasi dan mobilisator dalam pembangunan desa, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran kepala desa dalam upaya urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam pembangunan masyarakatnya.

- 2) Istiyana, melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Penggunaan Anggaran Dengan Realisasi Pembangunan Desa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan untuk mengetahui penghambat dalam peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan 4 anggota aparatur desa dan 4 masyarakat perdusun di Desa Grujugan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwasannya peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep di setiap program pembangunan sudah diterima oleh masyarakat meskipun tidak semua tokoh masyarakat yang menerimanya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Desa Grujugan sangat bermanfaat seperti halnya pembangunan pengerasan jalan yang dapat mempermudah masyarakat dalam melancarkan transportasi dan peningkatan perokonomian di Desa Grujugan. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kurangnya bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat kurang puas dengan adanya pembangunan tersebut. Dimana kurangnya pembangunan, pengaspalan, paving, pengerasan, saluran irigasi serta penyaluran air yang sudah di musyawarahkan di kegiatan musyawarah desa namun belum terlaksanakan.

- 3) Deibby K.A Pangkey, melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa Tatelu Satu dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijaka, keputusan-keputusan dan anggaran yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian kepala desa, sekretaris desa, 4 orang aparat desa, kepala jaga, tokoh masyarakat dan warga. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih di dasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang diterima desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan rumah tangga. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan studi kepustakaan, teori dan indikator yang digunakan dalam penelitian

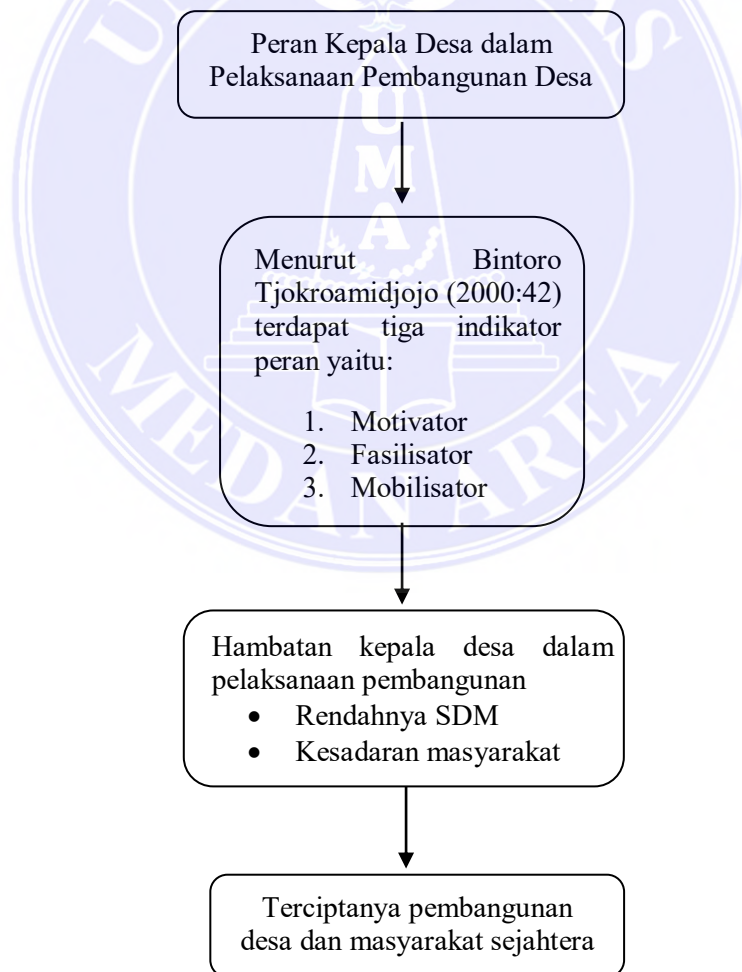
2.7 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian di perlukan pola atau kerangka pemikiran yang benar dengan memperhatikan konsep teori yang di kemukakan para ahli serta acuan-acuan lain yang di anggap relevan dengan penelitian. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah di indentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kepala desa memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari alur pikir bahwa pentingnya peran aktif kepala desa dalam pembangunan untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa. Untuk mencapai keberhasilan tersebut diperlukan kerja sama antara aparat desa dan masyarakat

yang diharapkan peran aktif masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai objek pembangunan desa, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada banyak teori yang digunakan untuk mengetahui peran kepala desa. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) dengan tiga indikator peran, yaitu motivator, fasilitator, mobilisator untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Nagori Karang Bangun. Adapun kerangka berpikir penelitian yang digambarkan oleh penulis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 1 kerangka berpikir, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan desa dapat dibagi menjadi tiga indikator, yaitu:

- 1) Motivator, yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu lainnya agar ikut melakukan tindakan-tindakan positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Kepala desa sebagai motivator, kepala desa mengajak langsung masyarakat untuk bermusyawarah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan.

- 2) Fasilitator, yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa demi kemudahan dan kelancaran proses pembangunan desa.

Kepala desa sebagai fasilitator, telah menyediakan fasilitas untuk lenacaran pembangunan seperti penggiling semen otomatis, menyediakan balai desa untuk bermusyawarah dan perbaikan jalan dan pondasi parit.

- 3) Mobilisator, yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Kepala desa sebagai mobilisator, kepala desa mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan nyata seperti gotong royong membersihkan jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), “penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, ketertarikan antar kegiatan.” Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan atau perubahan terhadap variabel yang diteliti, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya. Satu-satunya perlakuan adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2016:15) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.” Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menerangkan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang sedang diteliti secara lebih rinci dengan mempelajari semaksimal mungkin individu, suatu kelompok ataupun peristiwa.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mencari informasi dan mendeskripsikan objek permasalahan, peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terletak di Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

3.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian di Desa Karang Bangun sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jan	Feb	Apr	Agus	Juli	Agus	Sep
		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2024
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Data Penelitian							
6	Seminar Hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang Meja Hijau							

Tabel 1. Waktu Penelitian

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) “informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya sendiri ataupun

orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.” Dalam penelitian kualitatif informan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a) Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci ialah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Pj. Pangulu Nagori Karang Bangun adalah Bapak Jhon Vento Hasudungan Purba, ST.
- b) Menurut Afrizal (2016:139) informan utama ialah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Karang Bangun adalah Bapak Dicky Hartama Sinaga sebagai sekretaris desa dan Bapak Abdul Kodir sebagai Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan.
- c) Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat Nagori Karang bangun Bapak Darmawan dan Bapak Bambang Sinaga sebagai kepala dusun, Ibu Wiwik Widiyati sebagai masyarakat Nagori Karang Bangun.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mendapatkan data pada penelitian. Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sulit mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan data yang digunakan pada penelitian yang dimana meneliti kondisi yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2016:145) mengemukakan bahwa “observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.”

b. Wawancara

Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2019) wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti dan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat wawancara dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa serta beberapa masyarakat desa lainnya. Wawancara dilakukan secara terbuka dan peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin perihal tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta hambatannya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 240) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

3.6 Metode Analisi Data

Menurut Sugiyono (2016:60) analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah di dapatkan.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data:

a) Pengumpulan data

Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi data-data atau catatan yang didapatkan dari lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan samapi semua data terkumpul kemudian data dipahami dan dipelajari.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Reduksi data ini peneliti juga bertugas merangkum, memilih hal-hal yang pokok untuk diteliti dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.

Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

d) Kesimpulan Data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis data tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik dinatara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengelolaan data.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

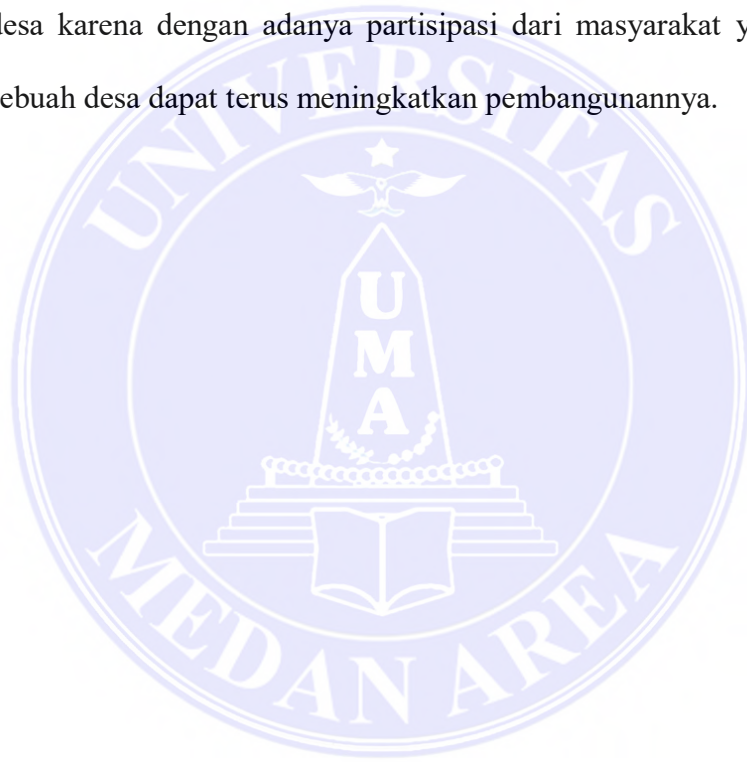
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Karang Bangun, yaitu:

1. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sudah cukup baik walaupun belum berjalan dengan optimal. Dimana kepala desa telah menjalankan perannya untuk memotivasi masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Hal tersebut dapat terlihat dari tiga indikator pembangunan, yaitu: motivator, fasilitator, dan mobilisator.
2. Faktor yang menjadi hambatan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan ialah sumber daya manusianya yang masih rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Selain pembinaan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan guna meningkatkan SDM bagi warga desa.
2. Diharapkan kepada Kepala Desa Karang Bangun untuk peran yang telah dilakukan dengan baik selama pembangunan yang telah berjalan agar di pertahankan di pembangunan-pembangunan selanjutnya.
3. Kepada masyarakat Desa Karang Bangun sebaiknya agar tetap ikut berpartisipasi dan peduli dalam menjaga setiap pembangunan yang ada di desa karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang baik maka sebuah desa dapat terus meningkatkan pembangunannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bintoro, R. 2003. *Interaksi Desa, Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Hal Utama Dalam Pembangunan*. Jogjakarta. Andi Offset
- N.Daldjoeni. 2011. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makasar: Garis Khatulistiwa.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Erlangga
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surhayanto. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali.
- Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara
- Widjaja, H.A.W. 20018. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Apandi, Apid. 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur*. Ejournal Ilmu Pemerintahan. 5(2). 711-720.

Setiawan, Anggi. 2013. *Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 1(3). 1095-1109.

Suwanti. 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Rapak Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrasi Negara. 4(1). 2234-2248.

Skripsi

Istiyana. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*. Jawa Timur. Universitas Wiraraja.

Nirwana. 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su`rulangi Kecamatan polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*. Makasar. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Prasetyo, Harry. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Fisik Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Tegal. Universitas Pancasakti Tegal.

Sari, Wilda. 2020. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Makasar. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

a. Daftar pertanyaan wawancara kepada informan kunci

1. Motivator

- 1) Bagaimana komunikasi yang bapak lakukan dengan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan?
- 2) Bagaimana cara bapak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa?
- 3) Apakah bapak selalu memberi dukungan berupa motivasi kepada aparat desa dalam bekerja?

2. Fasilitator

- 1) Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karang Bangun apakah bapak selaku pelaksana pembangunan menyediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembangunan tersebut?

3. Mobilisator

- 1) Bagaimana cara bapak menggerakkan dan mengarahkan aparat desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
4. Apa yang menjadi penghambat bapak selaku kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?

b. Daftar pertanyaan wawancara kepada informan utama

1. Motivator

- 1) Apakah bapak/ibu selalu dapat dukungan berupa motivasi dari kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?

2) Apakah kepala desa memberikan pelatihan yang mendukung pembangunan kepada aparat desa Karang Bangun?

2. Motivator

1) Fasilitas seperti apa yang diberikan atau disediakan oleh kepala desa dalam melakukan/mendukung pembangunan?

2) Apakah kepala desa menjamin sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan desa?

3. Mobilisator

1) Apakah bapak/ibu selaku aparat desa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa?

4. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa?

c. Daftar pertanyaan wawancara kepada informan tambahan

1. Motivator

1) Apakah bapak/ibu selalu mendapatkan himbauan dan dukungan dari kepala desa untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan?

2. Fasilisator

1) Apakah kepala desa memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?

3. Mobilisator

- 1) Apakah bapak/ibu selaku masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan desa?
- 2) Apa tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Bangun?



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Informan Kunci

Bapak Jhon Vento Hasudungan Purba, ST selaku Kepala Desa

(Sumber: Dokumen Pribadi, 22 Agustus 2022)



Gambar 2. Informan Utama

Bapak Dicky Hartama Sinaga selaku sekretaris desa

(Sumber: Dokumen Pribadi, 22 Agustus 2022)



Gambar 3. Informan Utama

Bapak Abdul Kodir selaku kepala urusan ekonomi pembangunan

(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 4. Informan Tambahan

Bapak Bambang Eka Putra Sinaga selaku kepala dusun dua

(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 5. Informan Tambahan
Ibu Wiwik Widiyati selaku masyarakat Desa Karang Bangun
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 6. Informan Tambahan
Bapak Darman selaku kepala dusun satu
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 7. Kegiatan Rapat Desa dengan masyarakat



Gambar 8. Balai desa Karang Bangun

Surat Izin Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 885/FIS.2/01.10/VII/2022	27 Juli 2022
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	
Yth, Kepala Desa Karang Bangun Kab. Simalungun Di Tempat	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :	
Nama : Fatimah Hafni Sinaga	
N P M : 188520069	
Program Studi : Administrasi Publik	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Karang Bangun Kab. Simalungun, dengan judul Skripsi "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun)"	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan, Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si	
CC : File,-	
	

Surat Selesai Riset dari Instansi

		PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN	
		KECAMATAN SIANTAR	
		PANGULU KARANG BANGUN	
		<small>Jl. Bangun Sri Huta IV Urung 05 Nagori Karang Bangun</small>	<small>Kode Pos : 21151</small>
<hr/>			
		Karang Bangun, 08 Juli 2024	
Nomor	:470/48/12.08.01.2008/2024	Kepada Yth :	
Sifat	: Biasa	Dekan	
Lampiran	: -	Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik	
Hal	: Telah Selesai Riset	Universitas Medan Area	
		Di	Tempat
Dengan Hormat			
Sehubungan dengan surat dari Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
Nomor : 885/FIS.2/01.10/VII/2022 perihal Pengambilan Data/Riset atas nama Mahasiswa/i :			
Nama	: Fatimah Hafni Sinaga		
NPM	: 188520069		
PRODI	: Administrasi Publik		
Berkenaan dengan hal ini kami Pemerintah Nagori Karang Bangun menerangkan bahwa Mahasiswa/i nama diatas telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset di wilayah Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.			
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian, diucapkan terimakasih.			
			